

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1966 proses industrialisasi di Indonesia sudah mulai berjalan, dimana sektor industri yang paling berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan didalam negeri adalah sektor industri manufaktur (Shofiana, 2012). Industri diartikan sebagai sebuah usaha yang dijalankan oleh sebuah perusahaan untuk mengelola bahan baku mentah atau setengah jadi sehingga menjadi sebuah produk jadi yang bernilai tambah, sebagai contoh industri tekstil yang merupakan industri untuk mengolah bahan baku tekstil menjadi produk setengah jadi dan selanjutnya dijadikan produk tekstil jadi (Wibowo, 2021). Kegiatan industri bisa didorong dengan sumber daya alam yang melimpah, karena sektor industri sudah jadi sebuah bidang usaha dengan jangka panjang yang dikoordinasikan untuk menjadi dinamisasi sektor yang lainnya dengan harapan akan membawa perekonomian secara utuh menuju tingkat perkembangan yang lebih baik atau dengan kata lain industri dipercaya akan menjadi sektor perdagangan jangka panjang sehingga mampu menjadi tulang punggung perekonomian negara dan mampu memberdayakan kemajuan yang berkesinambungan (Djojohadikusumo, 1987).

Studi empiris Tilaar (2010), menyatakan bahwa pada saat ini disetiap wilayah di Indonesia sudah mempunyai tata ruang untuk industri yang dinamakan sebagai lahan yang dikhususkan untuk industri. Hal ini dinyatakan dengan adanya keputusan Menteri Perindustrian mengenai pedoman pengarahan lokasi untuk kegiatan industri sesuai dengan SK Memperindag Nomor 17/M/SK/8/1993 yang mengatur mengenai dimana dan bagaimana lokasi industri ditemukan sehingga semua kegiatan industri harus berlokasi dilahan yang telah disediakan untuk kegiatan industri sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat.

Sektor industri merupakan salah satu sektor penyumbang dengan jumlah cukup besar dalam PDB (Produk Domestik Bruto) bahkan sektor industri mengalahkan sektor pertanian dalam hal jumlah PDB. Hal tersebut dapat

dilihat dari data PDB sektor industri dengan data PDB sektor pertanian menurut klasifikasi lapangan usaha berikut ini.

Tabel 1
PDB Sektor Industri pengolahan dan Sektor Pertanian Sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha 2017-2021

Tahun	PDB sektor industri	PDB sektor pertanian
2017	2.103.466,10	1.258.375,70
2018	2.193.368,40	1.307.253,00
2019	2.276.667,80	1.354.399,10
2020	2.209.290,30	1.378.398,90
2021	2.284.821,70	1.404.190,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 data diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah PDB sektor industri lebih besar dibandingkan jumlah PDB sektor pertanian. Hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa sektor industri lebih berpengaruh terhadap jumlah PDB di Indonesia dibandingkan dengan sektor yang lain.

Sektor industri juga jadi sebuah sektor yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, oleh karena itu pemerintah berupaya mengoptimalkan sektor industri dengan cara mengelompokkan beberapa wilayah yang memegang unggul dan menjunjung tinggi dalam kegiatan industri. Pengelompokan wilayah tersebut dinamakan sebagai aglomerasi. Kuncoro (2002), memperjelas pengertian aglomerasi dengan aglomerasi industri, dimana aglomerasi adalah sebuah bidang yang tidak mudah berubah karena terdapat penghematan eksternal yang terbuka untuk perusahaan yang berada dekat dengan lokasi pemasok keuntungan dan hal tersebut bukan hasil dari perhitungan perusahaan-perusahaan atau para buruh sektor industri secara perorangan. Berbeda halnya dengan aglomerasi industri adalah pemusatan aktivitas ekonomi secara spasial di kawasan perkotaan yang diakibatkan oleh faktor penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang dihubungkan terhadap pengelompokan spasial perusahaan, buruh, dan konsumen (Kuncoro, 2002).

Daerah aglomerasi pada umumnya mempunyai keunggulan dalam efisiensi dan mempunyai daya saing yang lebih unggul, sehingga akan

meningkatkan pendapatan (Adijaya, 2022). Menurut Lestari (2020), aglomerasi cenderung berada di wilayah yang memiliki potensi dan kemampuan wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari keberadaan perusahaan yang lokasinya saling berdekatan. Salah satu wilayah aglomerasi adalah kawasan perkotaan yang memiliki daya tarik bagi sebuah industri, karena pada umumnya kota menawarkan preferensi yang berbeda beda dalam bentuk efisiensi maupun dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi, menarik investasi baru, teknologi yang lebih baru, tenaga kerja yang lebih terdidik dan berbakat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Pulau Jawa yang paling mendominasi perannya dalam sektor industri dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Pulau Jawa tersebut salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan daya tarik yang dapat tercipta aglomerasi, karena adanya pusat industri disetiap kabupaten atau kotanya. Hal tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa jumlah perusahaan industri di Jawa Barat memiliki jumlah yang besar, khususnya perusahaan industri mikro dan kecil. Berikut ini adalah data mengenai jumlah industri mikro dan kecil di pulau Jawa pada tahun 2017-2021, menurut BPS (2023) sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah Perusahaan Mikro dan Kecil di Pulau Jawa Tahun 2017-2021

No	Pulau Jawa	Jumlah Perusahaan mikro dan kecil					Rata rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jawa Tengah	892.631	914.850	912.421	898.162	855.438	894.700,4
2.	Jawa Timur	852.301	779.390	862.450	828.482	762.015	816.927,6
3.	Jawa Barat	574.175	536.207	629.597	625.943	622.225	597.629,4
4.	D.I.Y	97.319	113.430	146.658	137.499	107.891	107.891,4
5.	DKI Jakarta	76.028	37.850	62.929	59.017	62.108	59.386,4
6.	Banten	268.195	258.112	235.022	235.192	202.672	239.838,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 data diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa Jawa Barat menduduki peringkat ketiga terbanyak atas jumlah perusahaan mikro dan kecil di Pulau Jawa dengan rata

rata jumlah perusahaan sebanyak 597.629,4 unit. Jumlah perusahaan mikro dan kecil di Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan bahwa di Jawa Barat bisa terjadi aglomerasi dimana hal tersebut sesuai dengan studi empiris yang dilakukan Swardnidi (2016), yang menjadi salah satu parameter terjadinya aglomerasi di suatu daerah adalah dengan banyaknya jumlah perusahaan di daerah tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor industri. Pertumbuhan ekonomi di sektor industri justru mengalami penurunan setiap tahunnya. Berikut data mengenai pertumbuhan ekonomi di sektor industri.

Tabel 3
Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB Sektor Industri	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
2017	578.703.236,92	5,3%
2018	616.427.069,99	6,5%
2019	640.760.957,62	3,9%
2020	612.799.433,48	-4,3%
2021	638.689.315,13	4,2

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 data diolah

Tabel 3 menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi di sektor industri di Jawa Barat menandakan terjadi penurunan. Bahkan dilihat dari data di atas pertumbuhan ekonomi sektor industri menurun hingga -4,3%. Hal ini yang jadi sebuah dasar penulis melakukan penelitian karena Jawa Barat memiliki jumlah perusahaan yang banyak, namun pertumbuhan ekonomi sektor industri justru cenderung menurun setiap tahunnya.

Aglomerasi industri dapat terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB), upah, dan infrastruktur jalan (Emalia, 2017). PDRB ialah penjumlahan nilai tambah barang dan jasa yang berasal dari kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam kurun waktu atau dalam periode waktu tertentu (Setiawan *et al.* 2005). Sementara menurut Sakti (2007), PDRB adalah sebuah parameter keberhasilan sebuah pembangunan

ekonomi, maka dari itu jika sebuah daerah mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi berarti daerah itu mempunyai kondisi ekonomi yang baik. Kondisi ekonomi yang baik disuatu daerah akan jadi sebuah daya tarik guna meningkatkan aglomerasi suatu daerah.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh perbedaan penelitian mengenai pengaruh PDRB terhadap aglomerasi industri. Menurut Wibowo (2021), mengatakan jika PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi industri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Salsabilah *et al.* (2020), Santosa *et al.* (2020), dan Zuliastri *et al.* (2013), dimana PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi industri. Akan tetapi berbeda halnya dengan studi empiris yang dilakukan Sakti (2007), menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap aglomerasi industri dikarenakan apabila PDRB meningkat maka aglomerasi industri juga meningkat sebagaimana jika PDRB tinggi maka ekonomi suatu daerah dikatakan baik sehingga menjadi daya tarik untuk sebuah perusahaan untuk beraglomerasi.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap aglomerasi selanjutnya ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). BPS (2023), menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mencapai kemajuan dalam menghasilkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga jadi indikator penting guna memperkirakan sebuah keberhasilan dalam menciptakan kualitas hidup manusia. Menurut Santosa (2020), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai peran penting dalam mengurangi sebuah disparitas Pembangunan karena IPM dapat digunakan untuk menggambarkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.

Penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap aglomerasi industri menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Menurut Salsabilah *et al.* (2020), menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap aglomerasi industri. Namun berbeda halnya dengan studi empiris Syaripuddin (2021), menjelaskan bahwa IPM

memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam meningkatkan aglomerasi industri, IPM hanya akan menghambat pertumbuhan aglomerasi industri. Menurut studi empiris Adijaya (2022), IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aglomerasi industri.

Menurut Todaro & Smith (2006), salah satu faktor yang jadi pemicu terciptanya aglomerasi adalah dengan terdapatnya tenaga kerja yang dapat mendongkrak tingkat keuangan negara. Menurut Mauleny (2015), menjelaskan bahwa keberadaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang sedang mencari pekerjaan atau angkatan kerja di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan bisa menjadi salah satu faktor pendorong utama bagi aglomerasi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mempunyai arti sebuah keadaan sebagai penggambaran jumlah angkatan kerja di dalam sebuah kelompok secara umum sebagai bentuk laju pertumbuhan penduduk dalam kelompok umur itu (Mulyadi, 2003). Kenaikan pada pertumbuhan aglomerasi dipengaruhi oleh partisipasi angkatan kerja dalam mencari pekerjaan di sebuah perusahaan industri, dimana apabila partisipasi angkatan kerja di sektor formal maupun informal meningkat maka memungkinkan tingkat pertumbuhan aglomerasi juga meningkat karena sumber daya manusia telah memenuhi guna menjalankan kegiatan ekonomi terutama produksi merupakan salah satu faktor terjadinya pertumbuhan aglomerasi.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap aglomerasi industri. Menurut studi empiris Adijaya (2022), partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap aglomerasi. Hal tersebut sesuai dengan studi empiris Windasari (2021), menjelaskan jika partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap aglomerasi. Berbeda dengan studi empiris Wibowo (2021), yang menjelaskan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pembangunan industri, karena tenaga kerja industri manufaktur di desa Celukanbawang hanya membutuhkan tenaga kerja yang sedikit.

Faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri berikutnya adalah Upah Minimum. Menurut Sumarsono (2003), upah minimum merupakan sebuah

penerimaan yang berupa honorarium dari seorang pengusaha atau pemilik perusahaan kepada pekerja atas pekerjaan yang sudah dikerjakan dan pemberian tersebut berupa uang tunai yang diputuskan berdasarkan undang-undang atas sebuah perjanjian diantara pengusaha dan pekerja termasuk juga subsidi atau bantuan untuk pekerja maupun keluarganya. Upah ialah contoh faktor yang berpengaruh atas terjadinya aglomerasi industri, sebab upah adalah biaya input yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah dengan tujuan untuk mendukung dan mengamankan kedua belah pihak (Emalia, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh upah minimum terhadap aglomerasi industri menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Menurut Wibowo (2021), upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif signifikan terhadap aglomerasi yaitu jika upah minimum kabupaten/kota mengalami kenaikan maka aglomerasi industri juga akan terjadi kenaikan begitu juga sebaliknya apabila upah minimum kabupaten/kota menurun maka aglomerasi industri juga akan ikut menurun. Berbeda halnya dengan studi empiris yang dilaksanakn Zuliastri *et al.* (2013) yang menjelaskan bahwa upah tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap aglomerasi industri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dijalankan Swardnidi (2016), dimana upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aglomerasi. Kemudian penelitian Emalia (2017), juga menyatakan jika upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aglomerasi.

Kemudian faktor yang terakhir adalah infrastruktur jalan. Menurut Taryono & Ekwarso (2013), infrastruktur jalan merupakan tulang punggung bagi sebuah perekonomian yang dapat menjembatani kegiatan ekonomi antar daerah sehingga pendistribusian barang dan jasa dapat berjalan dengan mudah. Pembangunan jalan sangat penting karena jalan akan memudahkan akses kemajuan di suatu daerah dan kehadiran jalan secara alami akan menghidupkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah (Emalia, 2017). Menurut *United Natoins development Programe* (UNDP), infrastruktur jalan yang memadai dapat mengurangi biaya transportasi, dapat menghubungkan

desa dengan pasar, mempermudah mobilitas produsen dalam penyaluran produk serta dapat meningkatkan akses masyarakat dalam menjangkau sekolah dan fasilitas kesehatan.

Beberapa penelitian lain juga menjadi latarbelakang dalam penelitian ini, yaitu dengan adanya perbedaan penelitian mengenai infrastruktur terhadap aglomerasi industri. Menurut Emalia (2017), menyatakan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aglomerasi industri karena panjang jalan memiliki kontribusi yang relatif penting pada berbagai kegiatan perekonomian dan pendistribusian barang atau jasa dari faktor produksi yang sangat berpengaruh pada keberadaan infrastruktur jalan. Hal tersebut sesuai dengan studi empiris Swardnidi (2016), yang memaparkan jika infrastruktur jalan berpengaruh positif serta signifikan terhadap aglomerasi industri. Berbeda halnya dengan studi empiris Wibowo (2021), infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi sebab infrastruktur (panjang jalan) dalam setiap tahunnya tidak terus menerus berubah ataupun mengalami perkembangan sehingga naik turunnya infrastruktur (panjang jalan) tidak dapat mendukung pertumbuhan aglomerasi industri.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas yaitu mengenai jumlah perusahaan yang banyak dan meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi di sektor industri cenderung menurun. Maka dengan hal itu penulis tertarik untuk menganalisis faktor faktor lain selain jumlah perusahaan yang mempengaruhi terjadinya aglomerasi. Dengan demikian judul penelitian ini yakni Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Infrastruktur Jalan terhadap Aglomerasi Industri di Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang sudah disampaikan dilatarbelakang yaitu mengenai pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Infrastruktur Jalan terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat, maka dari itu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

2. Apakah IPM berpengaruh terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
4. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
5. Apakah Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dipakai pada penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang dipakai yaitu PDRB atas dasar harga konstan, IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten, dan Infrastruktur Jalan menurut Kabupaten.
2. Variabel dependen yang dipakai yaitu Aglomerasi Industri Mikro dan Kecil.
3. Lokasi penelitian yaitu pada 26 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
4. Penelitian ini menggunakan data pada kurun waktu tahun 2017-2021.

D. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh IPM terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

5. Menganalisis bagaimana pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Aglomerasi Industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini membuktikan apakah teori lokasi benar benar menjadi alasan untuk sebuah pengusaha mendirikan perusahaanya.
- b. Penelitian ini membuktikan apakah aglomerasi muncul sebab penghematan lokalisasi dan urbanisasi dengan lokasi yang berdekatan sesuai dengan teori klasik.
- c. Penelitian ini menganalisis apakah teori neoklasik dapat memperkuat dengan adanya asumsi aglomerasi berasal dari sektor hasil konstan dan adanya persaingan sempurna
- d. Penelitian ini harapannya bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta bisa digunakan referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah pusat penelitian ini harapannya dapat dijadikan sumber informasi serta masukan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan terhadap pemusatan kawasan industri sehingga dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang industri.
- b. Untuk pemerintah daerah penelitian ini harapannya bisa digunakan rujukan dalam proses Pembangunan daerah terutama dibidang industri dimana industri sebagai penyumbang terbesar nilai PDRB. Penelitian ini bisa dipakai untuk bahan referensi untuk meningkatkan infrastruktur disetiap daerah sehingga memperlancar kegiatan ekonomi.